

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Definisi Konsep Penelitian

1. Perilaku Birokrasi

- a. Biddle dan Thomas (Sarlito Wirawan, 1984 : 235) mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam lingkungan berkaitan dengan peran harapan, norma, wujud perilaku dan evaluasi. W. Jack Duncan dalam Adam Indrawijaya (1981: 31) bahwa proses perilaku manusia berkenaan dengan kemampuan manusia dalam organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan mulai timbulnya rangsangan, persepsi, belajar, pemilihan tindakan dan perilaku serta konsekuensinya. Watson sependapat dengan B.F. Skinner yang dikemukakan oleh Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson dan Ernest R. Hilgard (1983 : 7-8) bahwa perilaku berkenaan dengan studi psikologi tentang " *mental experience*" berupa rangsangan, pengamatan dan persepsi terhadap sesuatu obyek dalam bentuk pengaruh atau stimulus , sehingga menimbulkan respons yang diwujudkan dalam sikap dan motivasi untuk melakukan kegiatan atau tindakan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Perilaku birokrasi menurut Miftah Thoha (1987: 186) adalah perilaku seseorang tidak saja dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan ditentukan dengan interaksi lingkungannya. Perilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi dari karakteristik individu dengan karakteristik organisasi pemerintahannya. Dengan model perilaku birokrasi pemerintahan sebagai berikut :

Karakteristik Individu

- kemampuan
- kebutuhan
- kepercayaan
- pengalaman
- penghargaan
- dsb

Karakteristik Organisasi

- herarhi
- tugas
- wewenang
- tanggung jawab
- sistem reward
- sistem kontrol

--- Perilaku Unsur Birokrasi ---

2. Birokrasi Pemerintahan

- a. Peter Blue dan Charles H. Page (Dalam M. Toha 1991: 7) mengemukakan birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis pekerjaan banyak orang. Birokrasi pemerintahan adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan untuk melaksanakan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
- b. Sedangkan Max Weber dalam John G. Garson dan Harris (1985: 21) mengatakan bahwa tipe ideal konsep organisasi (birokrasi) pemerintahan yang rasional adalah :
1. Prinsip pembagian tugas, kewenangan dan yuridiksi administratif diatur berdasarkan hukum, aturan dan ketetapan administratif;
 2. Prinsip herarhi dari kewenangan dan jabatan berdasarkan tingkatan yang diatur berdasarkan organisasi dan dikendalikan dari tingkat atas ke tingkat bawah;
 3. Prinsip pengisian dan promosi jabatan organisasi berdasarkan kualifikasi dan spesialisasi pekerjaan;
 4. Prinsip hubungan kerja dalam organisasi berdasarkan impersonal yang rasional;
 5. Pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh sistem peraturan dan prosedur pelaksanaan yang konsisten;
 6. Sistem penggajian berdasarkan kewenangan, jabatan dan keahlian dalam organisasi.

3. Pemerintahan di Daerah

Pemerintahan di daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang dan kewajiban organisasi pemerintah di daerah selaku unsur aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan guna mencapai dayaguna dan hasilguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, stabilitas politik dan peningkatan partisipasi serta pemerataan pembangunan di daerah.

4. Daerah Otonom Tingkat II

Daerah Otonom disebut Daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974, sehingga Daerah Otonom Tingkat II adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu (wilayah Kabupaten / Kotamadya) yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perilaku Unsur Birokrasi Pemerintahan di Daerah.

Perilaku unsur birokrasi pemerintahan di daerah adalah kemampuan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam lingkungan organisasi pemerintahan di daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat melalui pelayanan publik atau " *public service*" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara, 1993 : 17-18).

6. Pendidikan Sosial

Pendidikan Sosial sering disebut studi sosial atau " *social studies* " adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humanities yang diorganisir, diadaptasi dan disederhanakan untuk kepentingan pendidikan kewargaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keyakinan, pengambilan keputusan dan partisipasi sosial (Bar, Bart Shermis , 1978 : 3)

7. Transformasi

Transformasi adalah proses peralihan nilai yang mengandung unsur penanaman, penumbuhan, dan pengembangan sumber daya manusia berbudaya agar internalisasi sikap, nilai, inisiatif, kreativitas dan kemandiriannya (Soepardjo Adikusumo, 1992).

8. Kualitas Sumber Daya Manusia

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 merumuskan kualitas sumber daya manusia yaitu manusia yang maju dan mandiri dalam diri setiap manusia Indonesia yaitu : beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional. Dua sifat pertama, merupakan dimensi moral, etis dan spiritual dalam rangka pembentukan watak dan keribadian guna mempengaruhi sikap, perilaku dan perbuatannya yang ditanamkan melalui pendidikan non formal dengan proses yang berlangsung secara terus menerus di dalam keluarga, paguyuban umat beragama serta kepercayaan dan paguyuban masyarakat daerah. Delapan sifat lainnya merupakan dimensi jasmaniah, intelektual dan profesional dari watak manusia Indonesia yang ditumbuhkan, dikembangkan dan didayagunakan dalam masyarakat dan kebangsaan yang dibentuk melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat formal maupun non formal yang ada dalam masyarakat (Amanat Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Seminar Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada LPTTN tanggal 11 Mei 1995 di Magelang).

9. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal adalah suatu desa yang diadakan penilaian terhadap status desa didasarkan atas 27 indikator pada variabel untuk desa dan 25 untuk kelurahan dikategorikan desa tertinggal. Penilaiannya berupa indikator pada variabel Potensi Desa, Perumahan dan Lingkungan serta Kependudukan seperti dalam Potensi Desa Sensus Penduduk 1990 (BPS: 1993).

Variabel Potensi Desa meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- 1). Jalan Utama Desa
- 2). Potensi Pertanian dan Pemilikan Lahan Pertanian
- 3). Jarak dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan
- 4). Fasilitas Pendidikan
- 5). Fasilitas Kesehatan
- 6). Tenaga Kesehatan yang tinggal di Desa
- 7). Sarana Komunikasi
- 8). Pasar

Variabel Perumahan dan Lingkungan meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- 1). Kepadatan Penduduk
- 2). Sumber Air Minum
- 3). Wabah Penyakit
- 4). Bahan Bakar
- 5). Pembuangan Sampah
- 6). Jamban
- 7). Penerangan

Variabel Kependudukan meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- 1). Tingkat Kelahiran
- 2). Tingkat Kematian Kasar
- 3). Enrollment Ratio Penduduk Usia Sekolah
- 4). Rumah Tangga Memiliki Televisi (kurang dari 5 %) dan Telepon (kurang dari 1 %)
- 5). Rumah Tangga Pertanian di atas 30 %

10. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah suatu keadaan penduduk yang tingkat pendapatan, produktivitas, pendidikan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraannya di bawah garis kebutuhan yang rendah (INPRES Nomor 5 Tahun 1993).

11. Sasaran Program IDT

Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja, dan penguatan kelembagaan kelompok (INPRES Nomor 5 Tahun 1993).

12. Kelompok Sasaran Masyarakat (KSM)

Penduduk miskin yang bermukim di desa/kelurahan yang dikategorikan tertinggal, berpenghasilan rendah, terbatas kemampuan serta aksesnya dalam mendapatkan pelayanan, prasarana dan permodalan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memerlukan penanganan dan bantuan (INPRES No. 5 Tahun 1993).

13. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kelompok yang beranggotakan sekitar tiga puluh Kepala Keluarga

menyatukan diri dalam bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, keswadayaan dan kegotong royongan secara bersama berupa Kelompok Pedagang, Pengrajin, Petani/Peternak, Nelayan, Jasa Angkutan dan lain sebagainya (INPRES No. 5 Tahun 1993).

14. Kesejahteraan Kelompok Sasaran

Meningkatnya kondisi sosial dan ekonomi penduduk miskin kearah yang lebih maju melalui Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Sejahtera II (Inpres Nomor 5 Tahun 1993 dan Inpres No. 3 Tahun 1996).

B. Definisi Operasional Penelitian

1. **Perilaku Unsur Birokrasi Pemerintahan di Daerah Selaku Pelaksana Pendidikan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pada Desa Tertinggal** adalah tanggung jawab unsur aparatur pemerintah selaku pelaksana program IDT di daerah tingkat II Cirebon (POKJANAL, POKJA dan Pendamping) untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta partisipasi sosial guna meningkatkan kemampuan permodalan, usaha dan kelembagaan Pokmas penduduk miskin pada desa tertinggal menuju tahap kesejahteraan sosial ekonominya.

2. Pengetahuan dan Keterampilan Pokmas

Meningkatkan pengetahuan, sikap serta keterampilan dalam pengelolaan dana bantuan permodalan, usaha dan produktivitas kerja sesuai dengan potensi, kebutuhan dan pengembangan anggota Pokmas penduduk miskin melalui pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan pelatihan.

3. Partisipasi Sosial Pokmas

Keterlibatan penduduk miskin dalam pembentukan Pokmas, pengambilan keputusan penggunaan modal, peningkatan keterampilan, pengembangan jenis usaha dan kelembagaan maupun pemanfaatan hasil secara kebersamaan, keswadayaan dan keterpaduan dengan sistem sosial yang berlaku.

C. Indikator Pengetahuan dan Keterampilan serta Partisipasi Pokmas

1. Indikator Pengetahuan dan Keterampilan Pokmas

No	Jenis Pokmas	I n d i k a t o r
1.	Pokmas Pedagang	a. Manfaat Program IDT b. Sikap Berkelompok & Kerjasama c. Menentukan Jenis Usaha d. Pengelolaan Bantuan Modal e. Keterampilan Usaha Produktif f. Pemanfaatan Hasil Usaha
2.	Pokmas Pengrajin/ Industri Rumah Tangga	a. Manfaat Program IDT b. Sikap Berkelompok & Kerjasama c. Mengembangkan Jenis Industri Kerajinan d. Pengelolaan Bantuan Modal e. Keterampilan Industri Kerajinan f. Pemasaran Industri Kerajinan
3.	Pokmas Peternak	a. Manfaat Program IDT b. Sikap Berkelompok & Kerjasama c. Pengembangan Peternakan Kambing, Ayam dan Itik d. Pengelolaan Bantuan Modal Peter- nakan e. Keterampilan Pemeliharaan Ternak (Bibit, Kandang, Pakan dan Ke- sehatan) f. Pemasaran Hasil Ternak
4.	Pokmas Nelayan	a. Manfaat Program IDT b. Sikap Berkelompok & Kerjasama c. Pengembangan Perikanan Laut d. Pengelolaan Bantuan Perikanan e. Keterampilan Membuat Jala, Pe- ngawetan Ikan dan Terasi f. Pemasaran Hasil Nelayan

5.	Pokmas Jasa Angkutan/Perbengkelan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manfaat Program IDT b. Sikap Berkelompok & Kerjasama c. Pengembangan Usaha Jasa Angkutan /Perbengkelan d. Pengelolaan Beca, Bengkel Las, Bengkel Sepeda dan Beca e. Keterampilan Mengelas dan Per - bengkelan f. Produktivitas jasa Angkutan/Per-bengkelan
----	-----------------------------------	--

2. Indikator Partisipasi Sosial Pokmas

- a. Keterlibatan dan kesepakatan dalam menentukan nama, peserta, jumlah anggota Pokmas.
- b. Kesiapan menentukan kepengurusan (Ketua, sekretaris dan bendahara) Pokmas.
- c. Kesepakatan menentukan jenis usaha produktif Pokmas.
- d. Pengelolaan bantuan permodalan secara bersama dan produktif (administrasi).
- e. Memecahkan masalah kelompok secara kebersamaan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kemampuan Pokmas.
- f. Meningkatkan keterampilan secara internal kelompok dan eksternal sistem sosial.
- g. Pemanfaatan hasil bagi kepentingan anggota dan kelompok

D. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan gejala sosial yang tercermin pada issue problematik dan tujuan yang akan diteliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Fokus yang menyertai pendekatan penelitian kualitatif dilandasi oleh karakteristik penelitian yaitu : obyek ilmu pengetahuan sosial, latar alamiah, manusia sebagai instrumen, grounded research, data induktif, analisis deskriptif, prosedural dan fokus tertentu. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik dengan

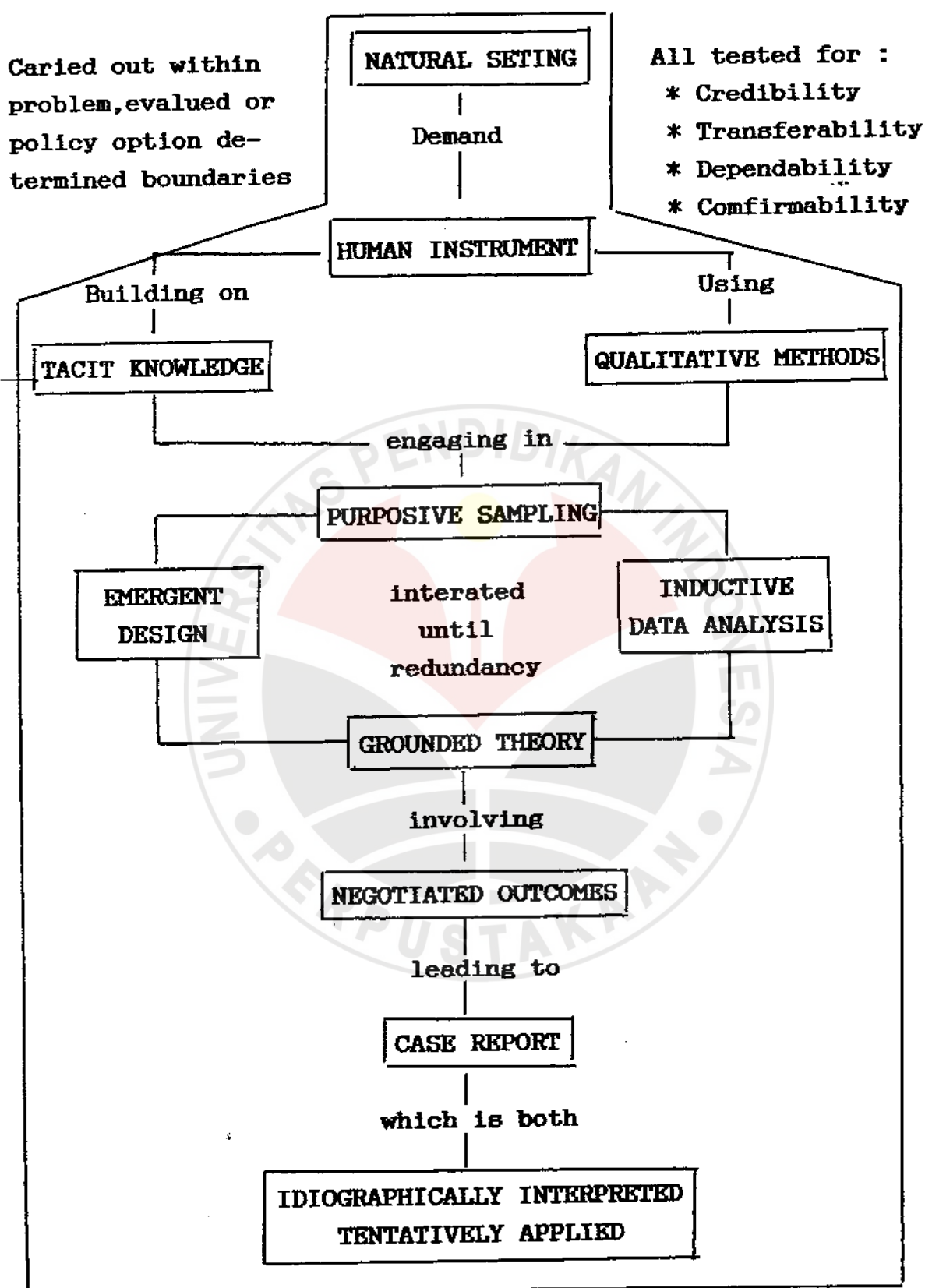
paradigma yang didasarkan pada setting alamiah, kualitatif, induktif, idiografik, tentatif, jaringan kausal, peranan nilai, keterhubungan dan negosiasi (Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba , 1985 : 39-44).

Seperti dikemukakan oleh Montagne (dalam Yvanna S. Lincoln dan Egon G. Guba, 1985 : 187) bahwa :

" *Naturalistic inquiry is always carried out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavil implicated in meaning. Such contectual inquiry demands a human instrument, one fully adaptive to the intermenate situation that will be encountered. The human insturmen builds upon his or her tacit knowledge as much as if not more than upon propositional knowledge, and use methods that are appropirate to humanly implemented inquiry : interview, observational, dokument analysis, unobstrusive clues and the like* ". (Penelitian naturalistik selalu memperhatikan aspek logika dan setting alamiah, sehingga materinya mempunyai implikasi yang bermakna. Keterhubungan penelitian pada intrumen manusia yang penuh adaptasi dengan situasi yang ditelitinya. Intrumen manusia dapat dikembangkannya melalui " *tacit knowlegde* " tidak hanya sebagai pengetahuan proporsional dan penggunaan penerapan metode penelitian yang mendukung peran manusia : seperti interview, observasi, analisis dokumentasi dan yang sejenisnya).

Untuk memahami gambaran penelitian naturalistik tersebut, maka di bawah ini terdapat model yang dikemukakan oleh Egon G. Guba (1984 : 188) adalah sebagai berikut :

GAMBAR.III.1. : ARUS PENELITIAN NATURALISTIK



Pendekatan penelitian kualitatif yang lebih menitik beratkan proses daripada fokus masalah gejala sosial yang diteliti melalui upaya memperoleh, menggali dan menemukan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan. Kemudian disusun dalam bentuk deskripsi secara sistematis, obyektif, utuh, dan relevan terhadap berbagai gejala atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Dari aspek lain, melalui pendekatan kualitatif lebih disoroti pada fenomena sosial yang berorientasi pada fenomena orientasi perilaku birokrasi pemerintahan di daerah dalam upaya pemberdayaan penduduk miskin, terutama yang terkait dengan kebijakan pemerintahan terhadap program IDT di daerah tingkat II Cirebon.

Sedangkan menurut Rochman. N (1987) bahwa " *Action Research* " bisa digolongkan penelitian tindakan yang ditujukan untuk pengembangan keterampilan yang menggunakan pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan menerapkan langsung hasil penelitian itu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya dilakukan intervensi kultural terhadap perilaku manusia dalam kehidupan sosial yang lebih baik.

Titik berat atau fokus pendekatan penelitian naturalistik, merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi baik untuk kelompok pelaksana pendidikan, pemerintah, kelompok masyarakat dalam upaya merealisasikan kebijakan dan program perubahan sosial. Dalam penelitian tindakan perilaku unsur birokrasi pemerintahan di daerah pelaksana transformasi pendidikan sosial pada kelompok sasaran miskin. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses transformasi nilai pendidikan sosial adalah aparat pemerintah di daerah, kelembagaan sosial, politik dan ekonomi, LSM, Perguruan Tinggi dan kelompok swadaya masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa tujuan peningkatan sumber daya manusia melalui pendekatan pendidikan sosial dan fungsi pemberdayaan penduduk miskin dalam rangka program IDT bagi pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak sesuai INPRES Nomor 5 tahun 1993 tersebut.

E. Bentuk Penelitian

Penelitian dilakukan dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan diarahkan guna memperoleh suatu konsep, proposisi, teori , paradigma dan model yang berkenaan dengan perilaku birokrasi pemerintahan, strategi pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia, transformasi pendidikan keterampilan maupun, model pelaksanaan program IDT. Sedangkan penelitian lapangan diarahkan untuk memperoleh gambaran empirik berupa data dan informasi yang relevan berupa kondisi dan situasi penduduk miskin, faktor yang mempengaruhi penduduk miskin serta perilaku birokrasi unsur pelaksana program IDT dalam pendekatan pendidikan sosial berupa pendekatan administratif maupun pendekatan pendidikan sosial dalam rangka pemberdayaan penduduk miskin. Data dan informasi tersebut merupakan dasar bagi kepentingan analisis diskriptif guna memperoleh generalisasi yang berguna bagi kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan maupun kebijakan pemerintah kelangsungan program IDT dalam pengentasan kemiskinan.

F. Satuan Unit Penelitian

Dengan bertitik tolak dari fenomena, masalah, premis dan paradigma penelitian yang berfokus pada perilaku unsur birokrasi pemerintahan dalam transformasi nilai pendidikan sosial untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin, maka yang dijadikan satuan unit penelitian adalah satuan Kelompok Masyarakat (Pokmas) penduduk miskin pada desa tertinggal. Kelompok Masyarakat Pedagang, Pengrajin, Peternak, Nelayan maupun Jasa Angkutan dan Perbengkelan pada empat desa tertinggal di empat Kecamatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

G. Populasi dan Sampel

Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon memiliki karakteristik politik, sosial, ekonomi, budaya, agama dan wilayah yang berbeda dengan daerah lain dan mempunyai 5 wilayah

Pembantu Bupati (kewedanaan), 23 Kecamatan dan 424 Desa/Kelurahan dengan memiliki 123 desa tertinggal yang bersifat pedesaan 50 desa dan perkotaan 73 desa. Untuk kepentingan penelitian digunakan sampel satuan pemerintahan Kecamatan dan Desa. Jenis sampel yang digunakan adalah berdasarkan jenis sampel prosedural melalui sampel berurut yang bersifat sampling tak probabilitas (restricted random sampling). Terlebih dahulu populasi diadakan analisa mengenai strukturnya, kemudian diadakan golongan kelompok kesatuan yang sejenis. Restricted sampling dapat dilakukan dengan cara berganda (double), petala (stratified) dan berkas (cluster) dalam Rochman Natawidjaya (1988 : 14)

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel stratifikasi baik dalam bentuk sampel wilayah pemerintahan maupun sampel quota serta proporsional/sebanding sehingga dapat mencerminkan sifat dari populasi Kecamatan dan Desa.

1. Sampel Strata Wilayah Pemerintahan

Jenis sampel penelitian yaitu " *Stratified Random Sample* ", berbentuk sampel wilayah pemerintahan Kecamatan dan Desa . Kabupaten Cirebon memiliki 23 Kecamatan, 424 Desa terdiri dari 123 desa pada 22 Kecamatan. Kecamatan tersebut dihubungkan dengan karakteristik wilayah kecamatan berada pada kecamatan pantai, pegunungan, dataran rendah dan perbatasan dengan kabupaten lainnya. Konsekuensi dari karakteristik kewilayahan tersebut, membawa implikasi terhadap desa tertinggal yang umumnya berada di wilayah terisolasi, perbatasan, pantai, padat penduduk maupun sumber alamnya kurang potensial. Oleh karena itu, dari 22 Kecamatan memiliki banyak, sedang dan sedikit desa tertinggal dijadikan sampel wilayah penelitian meliputi 4 kecamatan dan desa tertinggal yaitu :

- a) Kecamatan Beber berada pada sebelah Selatan Kabupaten Cirebon memiliki 13 Desa diantaranya terdapat 1 desa IDT dan berbatasan dengan Kabupaten DT. II Kuningan yang mempunyai karakteristik kecamatan pegunungan, sehingga sampel desa tertinggal yaitu Desa Cipinang ;

- b) Kecamatan Waled berada pada sebelah Tenggara Kabupaten DT II Cirebon dan berbatasan dengan Kabupaten DT II Berebes, Jawa Tengah dan Kuningan memiliki 19 desa diantaranya 12 desa IDT, mempunyai karakteristik kecamatan pedalaman, sampel desa tertinggal yaitu Desa Cilengkrang Kidul;
- c) Kecamatan Kapetakan berada pada sebelah Utara Kabupaten DT II Cirebon dan berbatasan dengan Kabupaten DT II Indramayu yang mempunyai karakteristik kecamatan pantai, memiliki 21 desa diantaranya terdapat 4 desa IDT, sehingga sampel desa tertinggal yaitu Desa Bungko Kidul.
- d) Kecamatan Weru berada pada ditengah-tengah Kabupaten Cirebon dan dekat pusat ibukota Kabupaten yang mempunyai karakteristik kecamatan perkotaan memiliki 23 desa diantaranya terdapat 11 desa IDT, sehingga sampel desa tertinggal adalah desa Gamel.

2. Sampel Purposif dan Proporsional Responden

Responden penelitian yang dijadikan seting dari sifat subyek atau pelaku program IDT dapat dikategorikan pada 5 kelompok responden yaitu :

- a) Unsur birokrasi pemerintahan di daerah tingkat II yaitu Bupati Kepala Daerah dan Ketua Bappeda selaku penanggung jawab , Kadit PMD, Dinas dan Instansi Vertikal Kabupaten selaku Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) pada tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b) Unsur birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan selaku penanggung jawab dan pelaksana (POKJANAL) tingkat kecamatan dibantu oleh para petugas teknis tingkat Kecamatan selaku fasilitator dan pendamping program IDT.
- c) Para Kepala Desa dan perangkat desa penanggung jawab dan pelaksana (POKJA) di tingkat yang menggerakkan Kelompok Sasaran Masyarakat penduduk miskin dalam program IDT.
- d) Para anggota LSM berupa LKMD/PKK, Kader Pembangunan Desa (KPD), dan Tokoh Masyarakat selaku pendamping Kelompok Sasaran Masyarakat atau Pokmas pada tingkat desa.

- e) Para Kelompok Sasaran Masyarakat penduduk miskin atau Pokmas yang mendapatkan bantuan dana program IDT baik dari unsur petani, nelayan, pengrajin, peternak dan pedagang kecil.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data skunder dan data primer baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif melalui :

- 1) Pedoman Wawancara yang dilakukan peneliti dengan kelima kelompok unsur responden untuk mendapatkan data primer.
- 2) Observasi yang dilakukan peneliti dengan dibantu peralatan observasi dengan melakukan observasi di kantor pemerintahan dan kegiatan penduduk miskin dalam pelaksanaan program IDT.
- 3) Daftar Isian atau kuesioner untuk responden penduduk miskin, penanggung jawab, pelaksana (POKJANAL dan POKJA) dan pendamping program IDT.
- 4) Studi Dokumentasi pada kantor-kantor dilingkungan pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk mendapatkan data skunder.

Sedangkan data primer dan skunder baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diperlukan adalah :

- a) Gambaran bibliografi wilayah, kebijaksanaan profil desa tertinggal, Latar belakang kemiskinan penduduk dari aspek historis, geografis, budaya dan sosial ekonomi.
- b) Faktor internal penduduk miskin dari segi pendidikan dan keterampilan, jumlah keluarga, agama, pendapatan, usaha atau pekerjaan, kesehatan, partisipasi masyarakatnya.
- c) Faktor eksternal penduduk miskin dari segi keterisolasian wilayah desa, sarana dan prasarana sosial ekonomi , program-program pembangunan masyarakat desa, pembinaan pemerintahan dan adat istiadat maupun budaya masyarakat.
- d) Model pelaksanaan administratif bantuan dana IDT pada Kelompok Sasaran Masyarakat atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) berupa penentuan masyarakat miskin, pembentukan dan penetapan kelompok, penggunaan dan pengelolaan dana,

monitoring serta pelaporannya dengan pendampingan dan bimbingan birokrasi pelaksana program IDT di daerah.

- e) Model transformasi nilai pendidikan sosial yang dilakukan birokrasi di daerah terhadap Pokmas miskin baik selaku pembina, penanggung jawab, pelaksana dan pendamping berupa pembinaan, pembimbingan, pelatihan keterampilan, dan metode pembinaan keterampilan serta upaya pembinaan keterampilan lainnya.
- f) Peran dan fungsi kelembagaan politik, sosial dan ekonomi di desa selaku dalam pemberdayaan terhadap KSM/Pokmas sehubungan dengan pelaksanaan program IDT melalui pendemokrasian, pengorganisasian, kegotong royongan dan peningkatan usaha kegiatannya.
- g) Keterlibatan unsur luar birokrasi pemerintahan baik kelembagaan politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan dunia usaha serta masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan program IDT sehubungan dengan pengentasan kemiskinan bagi peningkatan program IDT di wilayahnya.

I. Analisis Data

Data kualitatif dan kuantitatif yang dibutuhkan, dikumpulkan dan dikomfirmasikan melalui tahapan analisa deskriptif sebagai berikut :

- 1) Tahap mengumpulkan data baik berbentuk data primer maupun skunder melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan kuesioner.
- 2) Tahap analisa data dilakukan pencatatan, tabulasi, identifikasi, unitisasi/satuan data, katagorisasi dan deskripsi. Analisa data bersifat deskriptif baik data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan analisis deskriptif.
- 3) Tahap penulisan dilakukan dalam pembuatan disertasi dengan melakukan konsultasi dan diskusi dengan promotor, ko-promotor, anggota pembimbing dan pihak cendekiawan lainnya untuk mendapatkan rekomendasi sampai pengesahannya.